
WORKSHOP KONSULTASI HUKUM GRATIS DI DESA HARJOSARI, KARANGPANDAN

¹Widi Nugrahaningsih, ^{2*}Aryono, ³Aditya Hendra, ⁴Miftia Nur Annisa

^{1,2,3,4}Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, Indonesia

e-mail: aryono@udb.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Workshop Konsultasi Hukum Gratis di Desa Harjosari, Karangpandan bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum yang memadai kepada masyarakat desa, terutama mengenai hukum tanah, hukum keluarga, dan perijinan usaha. Desa Harjosari menghadapi berbagai permasalahan hukum, termasuk sengketa pertanahan dan permasalahan dalam sistem kekerabatan yang kuat. Keterbatasan akses konsultasi dan bantuan hukum di desa tersebut mendorong tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk melaksanakan kegiatan kemitraan dengan Desa Harjosari. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan memberikan layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat desa. Tim PKM memberikan penjelasan dan solusi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat, prosedur perijinan usaha, dan hukum keluarga. Kegiatan ini diadakan di Balai Desa Harjosari yang merupakan lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hasil dan pembahasan kegiatan PKM menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis. Banyak masyarakat yang melakukan konsultasi terkait sengketa tanah, perijinan usaha, dan hukum keluarga. Melalui konsultasi hukum, tim PKM memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memberikan edukasi tentang dasar hukum terkait kasus yang sedang dialami..

Kata Kunci: Konsultasi, Hukum, Gratis

ABSTRACT

The Free Legal Consultation Workshop in Harjosari Village, Karangpandan aims to provide adequate legal knowledge to the rural community, particularly regarding land law, family law, and business permits. Harjosari Village faces various legal issues, including land disputes and issues within a strong kinship system. The limited access to legal consultation and assistance in the village has prompted the Community Service team (PKM) from the Faculty of Law and Business at Duta Bangsa University Surakarta to engage in a partnership with Harjosari Village. The PKM activities are carried out by providing free legal consultation services to the village community. The PKM team provides explanations and legal solutions tailored to the issues faced by the community, as well as information regarding the rights and obligations of the people, business permit procedures, and family law. The activities take place at the Harjosari Village Hall, which is a strategic location easily accessible to the community. The results and discussions of the PKM activities demonstrate the enthusiasm of the community in utilizing the free legal consultation services. Many community members seek consultation regarding land disputes, business permits, and family law. Through legal consultations, the PKM team provides solutions to the issues faced by the community and educates them on the legal foundations related to their cases.

Keywords: Consultation, Law, Free

PENDAHULUAN

Lingkungan desa Harjosari, kecamatan Karangpandan, terletak jauh dari pusat pemerintahan dan pusat ekonomi kabupaten Karanganyar. Desa Harjosari menghadapi beberapa permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk sengketa pertanahan yang sering terjadi di lingkungan tersebut. Sengketa pertanahan meliputi batas wilayah tanah, jaminan atas tanah, pengelolaan tanah, dan lain sebagainya.

Selain itu, desa Harjosari juga menghadapi permasalahan dalam sistem kekerabatan yang kuat, sehingga masyarakat memerlukan pengetahuan tentang hukum keluarga. Permasalahan hukum

keluarga meliputi hukum waris, perkawinan, dan lain sebagainya. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah melakukan interaksi dengan masyarakat Harjosari dan menemukan bahwa sengketa tanah, perkawinan, dan hukum waris merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di desa tersebut.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, tim PKM melaksanakan kegiatan Workshop konsultasi hukum di desa Harjosari. Kegiatan ini penting karena desa tersebut terletak jauh dari kota dan akses konsultasi serta bantuan hukum masih terbatas. Ketersediaan kantor penasehat hukum seperti advokat juga belum ada di desa Harjosari. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat desa untuk memiliki pengetahuan hukum yang memadai, terutama mengenai hukum tanah, guna menghindari sengketa tanah di masa depan.

Selain hukum tanah, pengetahuan hukum keluarga juga diperlukan oleh masyarakat desa Harjosari karena sistem kekeluargaan yang kuat. Permasalahan seperti perkawinan dengan usia yang tidak disarankan oleh undang-undang dan pembagian waris yang kurang dipahami masih sering dihadapi oleh warga desa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum keluarga, baik itu hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata, menjadi penting bagi masyarakat desa.

Dalam perkembangan zaman yang pesat dan penambahan penduduk, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat semakin kompleks. Pemenuhan kebutuhan tersebut membutuhkan dukungan baik dari internal maupun eksternal. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, penting bagi pengusaha di desa Harjosari untuk memahami perijinan usaha agar dapat meningkatkan jalannya usaha. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai perijinan usaha menjadi penting dalam upaya peningkatan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil observasi, kunjungan, dan wawancara dengan masyarakat Harjosari, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain kurangnya pengetahuan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang pernah bersinggungan dengan hukum serta kurangnya kegiatan konsultasi hukum gratis bagi warga desa Harjosari. Oleh karena itu, tim PKM mengambil langkah untuk membuka stan konsultasi hukum gratis pada tanggal 14 Januari 2023.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat secara umum, memperkuat ekonomi masyarakat dengan memberikan konsultasi hukum terkait perijinan usaha, mengurangi risiko sengketa tanah di pedesaan melalui konsultasi hukum tentang hukum tanah, serta menciptakan suasana kondusif dalam rumah tangga warga desa melalui konsultasi hukum tentang hukum keluarga.

Tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari kalangan akademisi dari Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta melakukan kegiatan kemitraan dengan Desa Harjosari Karangpandan dengan tujuan-tujuan tersebut. Dalam kegiatan konsultasi hukum gratis tersebut, tim PKM akan memberikan penjelasan dan solusi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa.

Selain itu, tim PKM juga akan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam berbagai aspek hukum, memberikan pemahaman tentang prosedur perijinan usaha, memberikan panduan mengenai hukum keluarga seperti hukum waris dan perkawinan, serta memberikan saran-saran yang berguna dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi.

Dengan adanya kegiatan konsultasi hukum gratis ini, diharapkan masyarakat desa Harjosari dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan mendapatkan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, diharapkan pula bahwa kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pengetahuan hukum dan ekonomi masyarakat desa, serta mengurangi jumlah sengketa tanah dan meningkatkan harmoni dalam keluarga di desa Harjosari.

METODE

Kegiatan PKM dilaksanakan di Desa Harjosari, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dengan lokasi utama di Balai Desa Harjosari. Memilih lokasi tersebut karena lebih mudah dijangkau oleh masyarakat desa. Balai Desa Harjosari dianggap strategis karena dikenal oleh seluruh masyarakat desa dan memberikan kenyamanan karena dilakukan di lingkungan setempat.

Tahapan dan Langkah Pelaksanaan PKM meliputi beberapa langkah, yaitu persiapan,

pelaksanaan kegiatan di semester ganjil, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan survei dan kunjungan awal ke lokasi mitra untuk memperoleh izin dan informasi terkait kegiatan. Selanjutnya, dibuat proposal PKM dan diajukan ke LPPM kampus, serta menunggu konfirmasi izin dari lokasi dan verifikasi proposal. Setelah itu, surat keterangan balasan dari lokasi diserahkan ke LPPM kampus untuk diganti dengan surat tugas dan perjalanan dinas. Selama semester Ganjil tahun akademik, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lokasi dengan jadwal yang telah disepakati bersama tim dan pihak sekolah.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan di semester ganjil, kegiatan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setiap tahapan kegiatan PKM dibantu oleh mahasiswa dalam persiapan dan kelengkapan stand bantuan dan konsultasi hukum. Kegiatan utama tim PKM di Desa Harjosari dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Selama kegiatan, tugas dibagi sesuai dengan peran masing-masing anggota tim. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain konsultasi hukum tentang perijinan UMKM dan konsultasi hukum keluarga serta hukum tanah.

Pada tahap evaluasi, kegiatan PKM direncanakan dilaksanakan secara periodik setiap akhir semester ganjil. Evaluasi melibatkan diskusi, feedback, implementasi, dan pembuatan laporan oleh tim PKM. Laporan kegiatan PKM diserahkan kepada pihak LPPM kampus. Dengan demikian, tahapan dan langkah-langkah pelaksanaan PKM melibatkan persiapan yang cermat, pelaksanaan kegiatan yang terjadwal, dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat **Workshop Konsultasi Hukum Gratis** ini berlangsung sesuai kegiatan yang telah di jadwalkan. Kegiatan terlaksana sesuai dengan harapan, bahwa ternyata masyarakat juga antusias atas adanya layanan konsultasi hukum gratis di Desa Harjosari, karangpandan.

Secara umum, masyarakat banyak yang melakukan kegiatan konsultasi terkait tanah. Sedangkan secara khusus, kemudian beberapa masyarakat secara khusus konsultasi terkait kasus hukum yang sedang dialaminya. Kasus hukum yang dialami ini sesuai dengan prediksi dari Tim PKM, yang kebanyakan merupan permasalahan dalam bidang pertanahan, perijinan usaha, serta hukum keluarga.

Langkah yang dilakukan Tim PKM yang pertama memberikan konsultasi secara khusus kepada warga yang sedang menghadapi kasus hukum, dengan memberikan solusi permasalahan kepada warga. Solusi yang diberikan oleh tim PKM berupa arahan tindakan yang perlu dilakukan warga dalam menghadapi persoalan hukum, dan edukasi tentang dasar hukum atas kasus yang sedang dialami warga tersebut.

Kegiatan PKM ini telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Pertama, terjadi peningkatan pengetahuan hukum masyarakat secara umum, termasuk pemahaman yang lebih baik mengenai kasus hukum yang dihadapi oleh warga. Kedua, konsultasi hukum terkait perijinan usaha telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Warga dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengelola usaha dengan lebih baik. Selain itu, kegiatan konsultasi hukum mengenai hukum tanah juga membantu mengurangi risiko terjadinya sengketa tanah di pedesaan. Warga yang menghadapi kendala atau sengketa terkait tanah dapat memperoleh panduan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir, konsultasi hukum mengenai hukum keluarga telah menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga warga desa. Warga dapat berkonsultasi mengenai pewarisan dan masalah hukum keluarga lainnya, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan adil dan hubungan keluarga diperkuat. Melalui kegiatan PKM ini, masyarakat memperoleh manfaat nyata dalam hal pengetahuan hukum, perekonomian, penyelesaian sengketa tanah, dan harmonisasi rumah tangga.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Workshop Konsultasi Hukum Gratis di Desa Harjosari telah menghasilkan beberapa hal positif. Pertama, kegiatan ini berhasil dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan keteraturan dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kedua, kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan efektif dan mampu memberikan edukasi kepada warga mengenai kasus-kasus hukum yang sedang mereka hadapi. Dengan adanya workshop konsultasi hukum gratis, warga dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks. Terakhir, hasil evaluasi menunjukkan bahwa warga menjadi lebih waspada apabila menghadapi kasus hukum di masa yang akan datang. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masalah hukum dengan lebih siap dan bijaksana.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Workshop konsultasi hukum Gratis ini berlangsung sesuai kegiatan yang telah di jadwalkan. Kegiatan terlaksana sesuai dengan harapan, bahwa ternyata masyarakat juga antusias atas adanya layanan konsultasi hukum gratis di Desa Harjosari, Karangpandan.

Secara umum, masyarakat banyak yang melakukan kegiatan konsultasi terkait tanah. Sedangkan secara khusus, kemudian beberapa masyarakat secara khusus konsultasi terkait kasus hukum yang sedang dialaminya. Kasus hukum yang dialami ini sesuai dengan prediksi dari Tim PKM, yang kebanyakan merupakan permasalahan dalam bidang pertanahan, perijinan usaha, serta hukum keluarga.

Langkah yang dilakukan Tim PKM yang pertama memberikan konsultasi secara khusus kepada warga yang sedang menghadapi kasus hukum, dengan memberikan solusi permasalahan kepada warga. Solusi yang diberikan oleh tim PKM berupa arahan tindakan yang perlu dilakukan warga dalam menghadapi persoalan hukum, dan edukasi tentang dasar hukum atas kasus yang sedang dialami warga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, A., Aulia, A. F., & Ramayanti, N. (2019, October). Integrasi teknologi dalam pembelajaran: Upaya untuk beradaptasi dengan tantangan era digital dan revolusi industri 4.0. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 449-455).
- Fathanudien, A., Budiman, H., & Tendiyanto, T. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 286-292.

- Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01).
- Tanjung, A. M. (2017). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum. *FOCUS UPMI*, 6(1), 29-37.
- Winarta, F. H. (2013). *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama.